

Analisis Peran Sekretaris Perusahaan dalam Mendukung Proses Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) di PT PLN Batam

Chelsy Winda Simatupang^{1*}, Eki Darmawan²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
chelsywinda@gmail.com

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) is a vital component of corporate management because it plays a role in creating a governance system that is transparent, accountable, and responsible. In the implementation of GCG, the corporate secretary holds a strategic position in supporting the smooth operation of governance processes, particularly in GCG assessment and evaluation activities. This study aims to analyze the role of the corporate secretary in supporting the Good Corporate Governance (GCG) assessment process at PT PLN Batam. This study employs a qualitative approach using a descriptive method. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation of parties involved in the implementation of corporate governance. The results of the study indicate that the corporate secretary plays a role in coordinating the collection of evidence, liaising with Persons in Charge (PICs) across work units, managing supporting documents for GCG assessments, and ensuring that the necessary information is available in a timely manner. In addition, the corporate secretary also plays a role in preparing meeting minutes, archiving governance documents, and monitoring follow-up actions on areas for improvement identified through evaluations. This study shows that the role of the corporate secretary is not merely administrative but also supports the enhancement of transparency, accountability, and the continuous improvement of corporate governance. The implications of this study underscore the importance of optimizing the role of the corporate secretary as part of an organization's governance mechanisms.

Keywords: Corporate Secretary, Good Corporate Governance, Corporate Governance.

Abstrak

Good Corporate Governance (GCG) menjadi bagian penting dalam pengelolaan perusahaan karena berperan dalam menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan GCG, sekretaris perusahaan memiliki posisi strategis dalam mendukung kelancaran proses tata kelola, khususnya pada kegiatan penilaian dan evaluasi GCG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sekretaris perusahaan dalam mendukung proses penilaian Good Corporate Governance (GCG) di PT PLN Batam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekretaris perusahaan berperan dalam mengoordinasikan pengumpulan evidence, menghubungkan Person in Charge (PIC) antar unit kerja, mengelola dokumen pendukung penilaian GCG, serta memastikan informasi yang diperlukan tersedia secara tepat waktu. Selain itu, sekretaris perusahaan juga berperan dalam penyusunan risalah rapat, pengarsipan dokumen tata kelola, dan pemantauan tindak lanjut area of improvement hasil evaluasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi sekretaris perusahaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendukung penguatan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi peran sekretaris perusahaan sebagai bagian dari mekanisme tata kelola organisasi.

Kata Kunci: Sekretaris Perusahaan, Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan.

Copyright (c) 2026 Chelsy Winda Simatupang, Eki Darmawan

✉ Corresponding author: Chelsy Winda Simatupang

Email Address: chelsywinda@gmail.com (Jl. Raya Dompok, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau)

Received 13 June 2026, Accepted 29 June 2026, Published 14 July 2026

PENDAHULUAN

Good corporate governance (GCG) merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan perusahaan yang sehat, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Penerapan GCG tidak hanya

dimaksudkan untuk memastikan perusahaan dikelola sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pemegang saham, organ perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya. melalui tata kelola yang baik perusahaan diharapkan mampu menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. sekaligus membangun sistem pengawasan yang memungkinkan. deteksi dini terhadap kesalahan penyimpangan maupun potensi kesalahan dengan demikian Good Corporate Governance (GCG) hanya berfungsi sebagai instrumen Pengendalian internal, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik, menjaga reputasi perusahaan, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan (Sudharmono and Tunjungsari 2021).

Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan Good Corporate Governance (GCG) memiliki kedudukan yang semakin penting karena BUMN tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga memikul tanggung jawab pelayanan publik dan pengelolaan aset negara. Oleh karena itu, penerapan Good Corporate Governacance (GCG) di lingkungan BUMN telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui peraturan menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, yang mewajibkan setiap BUMN menjadikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai dasar operasional perusahaan, serta menyusun pedoman implementasi secara komprehensif. Ketentuan tersebut diperkuat melalui surat keputusan sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK- 16/S.SMBU/2012 yang menetapkan indikator penilaian dan evaluasi Good Corporate Governance (GCG) yang mengharuskan BUMN Melakukan asesmen berkala untuk mengukur tingkat penerapan, mengidentifikasi, kelemahan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memantau konsistensi implementasi prinsip GCG (Sudharmono & Tunjungsari, 2021). Meskipun demikian, implementasi GCG Dalam praktiknya tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tantangan penerapan GCG di perusahaan, termasuk di sektor ketenagalistrikan, Masih ditemukan pada aspek transparansi informasi, efektivitas, komunikasi organisasi, konsistensi pelaksanaan tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap ketentuan tata kelola. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan instrumen penilaian, tetapi juga kemampuan organisasi dalam mengelola proses asesmen Good Corporate Governace (GCG) secara efektif. Penilaian GCG membutuhkan ketersediaan data dan dokumen yang akurat, koordinasi lintas unit yang baik, kejelasan alur komunikasi, serta konsistensi tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Apabila aspek-aspek tersebut tidak dikelola secara memadai, maka penilaian menjadi beresiko sekedar pemenuhan administratif, tanpa benar-benar merefleksikan kondisi tata kelola yang sesungguhnya di dalam perusahaan. Dalam proses tersebut, sekretaris perusahaan menempati posisi yang strategis. secara kelembagaan, sekretaris perusahaan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada saat yang sama, sekretaris memiliki keterkaitan erat dengan fungsi komunikasi korporasi, keterbukaan informasi, keterbukaan informasi

dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. dalam konteks penilaian Good Corporate Governance GCG peran tersebut menjadi sangat penting. Karena, sekretaris perusahaan berpotensi menjadi koordinator dalam pengumpulan eviden, penilaian fasilitator, komunikasi antar unit pengawal konsistensi. pemenuhan indikator sekaligus penghubung antara perusahaan dengan pihak asessor atau pemangku kepentingan pihak terkait. dengan kata lain, kualitas pelaksanaan penilaian GCG tidak hanya dipengaruhi oleh substansi tata kelola yang dimiliki perusahaan tetapi juga oleh efektivitas. peran aktor internal yang mengelola mengkonsolidasikan dan mengkomunikasikan proses penilaian tersebut pelaksanaan asesmen good corporate governance GCG bertujuan untuk mengetahui kualitas penerapan Good Corporate Governance mengidentifikasi kelemahan serta memberikan rekomendasi perbaikan sambil juga memantau konsistensi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan (Sudharmono and Tunjungsari 2021)

Namun, sebagian besar penelitian mengenai Good Corporate Governance (GCG) masih berfokus pada hubungan penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan, nilai perusahaan, maupun kualitas laporan keuangan. Kajian yang membahas proses internal pelaksanaan penilaian GCG serta keterlibatan sekretaris perusahaan sebagai pengelola koordinasi, informasi, dan dokumentasi masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan asesmen GCG tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi dan indikator penilaian, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola komunikasi, koordinasi lintas unit, serta memastikan tindak lanjut hasil evaluasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian untuk memahami bagaimana sekretaris perusahaan menjalankan perannya dalam mendukung efektivitas proses penilaian GCG.

Penelitian ini mengambil fokus pada PT PLN Batam Karena perusahaan ini memiliki karakteristik kelembagaan dan operasional yang relevan untuk dikaji dalam perspektif tata kelola. Sebagai entitas yang bergerak di sektor ketenagalistrikan dengan konteks wilayah kepulauan dan dinamika kebutuhan pelayanan publik PT PLN Batam. kompleksitas tersendiri dalam pengelolaan informasi koordinasi lintas fungsi dan pemenuhan kebutuhan tata kelola perusahaan. Di sisi lain, sebagai bagian dari ekosistem korporasi PT PLN Batam tetap dituntut untuk menjaga kualitas penerapan GCG melalui struktur dan akuntabel. Kondisi tersebut menjadikan PT PLN Batam sebagai konteks yang menarik untuk menelaah Bagaimana peran sekretaris perusahaan dijalankan dalam mendukung penilaian GCG, khususnya dalam menghubungkan kebutuhan kepatuhan korporasi dengan realitas operasional perusahaan di tingkat lokal. (Pasaribu, Siregar, and Haikal, 2026)

Secara teoritis penelitian ini memanfaatkan agency theory, stewardship theory, dan stakeholder Theory (Pasaribu, Siregar, and Haikal, 2026) untuk menjelaskan peran sekretaris perusahaan dalam penilaian GCG dalam perspektif tersebut, sekretaris perusahaan dipahami sebagai penghubung informasi, aktor strategis, tata kelola, sekaligus fasilitator komunikasi dan transparansi. Karena itu, keberhasilan penilaian GCG tidak hanya ditentukan oleh instrumen dan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas peran sekretaris perusahaan dalam mengkoordinasikan proses penilaian. penelitian ini difokuskan untuk menganalisis peran tersebut di PT PLN Batam faktor-faktor yang mempengaruhi

efektivitasnya, serta kontribusinya terhadap penguatan akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan tata kelola

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih Karena penelitian ini berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai peran sekretaris perusahaan dalam mendukung pelaksanaan penilaian *good corporate governance* GCG di PT PLN Batam. Melalui pendekatan ini peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif terkait proses pengalaman serta praktik yang dilakukan oleh informan dalam menjalankan fungsi tata kelola perusahaan. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian (Sugiyono, 2013).

Penelitian dilaksanakan di PT PLN Batam dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian. Teknik ini dipilih karena informan yang terlibat merupakan pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait pelaksanaan GCG di perusahaan. Informan utama dalam penelitian ini adalah sekretaris perusahaan PT PLN Batam sedangkan informan pendukung berasal dari unit kerja yang terlibat dalam proses penilaian GCG, seperti *governance and* *Ris compliance GRC* serta *person in charge* atau *pac* pada bidang terkait pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan Kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Yusuf, 2013).

Pengumpulan data dilakukan melalui cara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai peran sekretaris perusahaan dalam mendukung penilaian GCG. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata serta aktivitas yang berkaitan dengan implementasi tata kelola perusahaan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui penalaran berbagai dokumen perusahaan, seperti *annual report* *sustainability report* *manual*, laporan hasil penilaian GCG dan dokumen pendukung lainnya. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan meningkatkan keakuratan hasil penelitian

HASIL DAN DISKUSI

Perkembangan implementasi good corporate governance di PT PLN Batam

Berdasarkan hasil penelitian PT PLN Batam menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* GCG. Komitmen tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan penilaian tata kelola yang dilakukan secara rutin Serta adanya upaya perbaikan berkelanjutan terhadap rekomendasi yang dihasilkan dari proses evaluasi. Penilaian GCG tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur kualitas tata kelola perusahaan dan mengidentifikasi area yang masih memerlukan penyempurnaan.

Data penelitian menunjukkan bahwa skor GCG PT PLN Batam mengalami kecenderungan meningkat selama periode 2022 sampai 2025 pada Tahun 2022 perusahaan memperoleh nilai 91,051 melalui penilaian auditor eksternal. Nilai tersebut meningkat menjadi 91,07 pada tahun 2023 melalui mekanisme self assessment. Pada tahun 2024 skor penilaian dengan metode sk-16 meningkat menjadi 91,86 sementara ketika menggunakan instrumen ASEAN corporate governance scorecard (ACGS) perusahaan memperoleh nilai 94,95. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2025 ketika skor acgs mencapai 102,60.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Penilaian GCG PT PLN Batam Tahun 2022–2025

Tahun	Metode Penilaian	Nilai
2022	SK-16	91,051
2023	SK-16	91,07
2024	SK-16	91,86
2024	ACGS	94,95
2025	ACGS	102,6

Sumber: Data Sekretariat Perusahaan PT PLN Batam, 2026

Peningkatan skor tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mempertahankan standar tata kelola yang telah ada tetapi juga mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan sistem penilaian yang diterapkan. Kenaikan nilai pada periode penelitian mengindikasikan adanya proses pembelajaran organisasi yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam konteks ini peran sekretaris perusahaan menjadi penting karena berfungsi sebagai pihak yang mengkoordinasikan proses penilaian mengelola kebutuhan eviden serta memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh unit terkait.

Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi GCG tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi maupun kebijakan internal perusahaan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas aktor organisasi yang menjalankan fungsi tata kelola perusahaan tidak hanya tercermin dari dokumen yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana dokumen tersebut diimplementasikan dan diawasi dalam praktik sehari-hari.

Peran sekretaris perusahaan dalam mendorong transparansi informasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu aspek yang mendapatkan perhatian besar dalam pelaksanaan GCG di PT PLN Batam. Sekretaris perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi perusahaan dapat diakses secara memadai oleh pemegang saham, regulator, auditor maupun pihak lain yang berkepentingan.

"...Media untuk transparansi itu kita punya website, website PLN Batam. Di website itu kita udah upload semua terkait dengan GCG code, terkait dengan board manual, terkait dengan annual report atau sustainability report. Jadi terkait hal-hal transparansi itu kita udah upload di website kita..." (Kutipan wawancara dengan asisten manager kesekretariatan dan document control).

Pelaksanaan prinsip transparansi diwujudkan melalui sustainability report setiap tahun. Kedua laporan tersebut memuat informasi mengenai kondisi perusahaan kinerja, strategi bisnis pengelolaan resiko, program keberlanjutan serta berbagai aktivitas yang telah dilakukan selama periode tertentu.

Selain itu, perusahaan juga mempublikasikan berbagai dokumen tata kelola seperti Bolt manual, GCG kode, kebijakan perusahaan, dan Pedoman tata kelola lainnya melalui platform digital perusahaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang dilakukan PT PLN Batam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan penilaian GCG tetapi juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam membangun kepercayaan stakeholder. Kemudahan akses terhadap informasi memungkinkan pemegang saham dan pihak terkait memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dan arah kebijakan perusahaan.

Apabila dianalisis menggunakan stakeholder Theory tindakan tersebut mencerminkan upaya perusahaan dalam memenuhi hak informasi seluruh stakeholder titik transparansi berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Semakin terbuka Informasi yang disampaikan semakin besar pula peluang terciptanya hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan legitimasi.

Selain itu, digitalisasi dokumen tata kelola menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Pemanfaatan media digital tidak hanya mempercepat penyebaran informasi tetapi juga meningkatkan efisiensi proses dokumentasi dan pengelolaan data perusahaan.

Peran sekretaris perusahaan sebagai penghubung antar unit dalam penilaian GCG

Berdasarkan hasil wawancara proses penilaian GCG melibatkan hampir seluruh unit kerja yang ada di perusahaan setiap indikator penilaian membutuhkan dokumen pendukung yang berbeda sehingga keberhasilan asesmen sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengelola koordinasi lintas unit.

“...untuk penilaian GCG itu tidak hanya dari sekretariat atau sekretaris perusahaan saja, tetapi itu membentuk tim. Tim dari berbagai bidang, jadi masing-masing bidang bertanggung jawab untuk evidence-nya. Sehingga untuk pemenuhan evidence dalam waktu mepet itu dapat dilakukan bersama-sama atau paralel gitu. Jadi tidak ada kekurangan data atau informasi terkait bidang masing-masing karena dipegang oleh PIC masing-masing.” (Kutipan wawancara dengan asisten manager kesekretariatan dan document control).

Berdasarkan hasil wawancara Salah satu tantangan yang sering muncul adalah keterlambatan penyampaian evidence dari unit kerja tertentu. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut PT PLN batang menerapkan sistem person in charge PIC pada setiap bidang setiap PIC bertanggung jawab terhadap dokumen yang berkaitan dengan indikator tertentu dan berkewajiban memastikan bahwa dokumen tersebut tersedia ketika dibutuhkan.

Dalam mekanisme ini, sekretaris perusahaan bertindak sebagai koordinator utama yang menghubungkan seluruh PIC fungsi koordinasi dilakukan melalui pemantauan progres verifikasi kelengkapan dokumen serta komunikasi intensif dengan unit terkait. Sistem ini memungkinkan proses pengumpulan evidence dilakukan secara paralel sehingga mengurangi resiko keterlambatan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi sekretaris perusahaan sesuai dengan konsep Agency Theory, dimana sekretaris perusahaan membantu mengurangi kesenjangan informasi melalui koordinasi dan penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh pihak terkait. Selain itu, peran tersebut juga mencerminkan prinsip Stakeholder Theory karena sekretaris perusahaan membantu menjaga hubungan antara perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dari perspektif agency teori mekanisme tersebut merupakan bentuk penguatan sistem Pengendalian internal. Pembagian tanggung jawab yang jelas membantu mengurangi potensi terjadinya asimetri informasi serta memastikan bahwa setiap unit menjalankan kewajiban sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penguatan akuntabilitas melalui dokumentasi dan tata kelola rapat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sekretaris perusahaan memiliki fungsi penting dalam menjaga akuntabilitas hubungan antara direksi dan dewan komisaris. Peran tersebut diwujudkan melalui pengelolaan agenda rapat, koordinasi penyediaan materi, penyusunan dokumentasi hingga pengarsipan hasil rapat.

"...Sisi akuntabilitasnya dalam pembuatan undangan, biasanya beliau berkoordinasi dengan sekretaris dewan komisaris terkait agenda-agenda apa aja yang akan dibahas... Untuk sirkulasi risalah rapatnya, kalau risalah Dewan Dekom-Direksi itu disusun oleh Sekdekom. Nah, Sekdekom nanti akan koordinasi dengan Sekper terkait isi dan resume yang telah dibuat. Nah nanti Direksi dan Dekom akan menandatangani risalah rapat tersebut. Dan penyimpanannya pun nanti akan ada di Sekdekom dan sekretaris perusahaan." (Kutipan wawancara dengan asisten manager kesekretariatan dan document control).

Suruh proses rapat dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi. Setiap keputusan yang dihasilkan dituangkan ke dalam risalah rapat yang disusun melalui koordinasi antara sekretaris perusahaan dan sekretaris dewan komisaris. Dokumen tersebut kemudian disahkan oleh direksi dan dewan komisaris sebagai bentuk legitimasi terhadap keputusan yang telah diambil.

Keberadaan dokumentasi yang lengkap menjadi bukti bahwa perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas secara nyata. Setiap keputusan memiliki dasar pertimbangan yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham maupun pihak lain yang berkepentingan.

Independensi sekretaris perusahaan dalam menjalin objektivitas tata kelola

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PLN Batam menerapkan mekanisme pendokumentasian rapat yang cukup ketat. Dalam setiap rapat direksi dan dewan komisaris digunakan alat rekam untuk memastikan seluruh proses diskusi terdokumentasi secara utuh.

"...kita itu menyediakan alat, alat rekam untuk merekam semua rapat direksi tersebut apa yang dibicarakan, kemudian kita akan menuangkannya dalam risalah rapat itu sampai dengan kita membuat resumennya... [Sikap sekretaris perusahaan] netral, karena tidak boleh memihak. Karena sekretaris perusahaan itu hanya mencatat, dia tidak boleh ikut mengambil suara dalam rapat itu. Nah jadi beliau

netral, jadi beliau enggak boleh memihak gitu ya, beliau hanya bertugas sebagai notulen atau sebagai moderator saja." (Kutipan wawancara dengan asisten manager kesekretariatan dan document control).

Praktik ini memungkinkan perusahaan mencatat berbagai dinamika yang terjadi selama rapat termasuk adanya perbedaan pendapat maupun masukan kritis dari peserta rapat kok. Sekretaris perusahaan bertindak sebagai pihak yang netral dan tidak memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan.

Netralitas tersebut penting untuk menjaga objektivitas dokumentasi. Dengan adanya rekaman dan risalah rapat yang lengkap, perusahaan dapat menunjukkan bahwa keputusan yang dihasilkan merupakan hasil proses diskusi yang terbuka dan tidak sekedar formalitas administratif.

Peran sekretaris perusahaan dalam penguatan kepatuhan dan manajemen risiko

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa setiap keputusan strategis di PT PLN Batam harus melalui proses kajian yang melibatkan fungsi governance, risk, dan compliance GRC. Kajian tersebut bertujuan memastikan bahwa keputusan yang akan diambil telah sesuai dengan ketentuan hukum, kebijakan perusahaan, dan pertimbangan risiko yang relevan.

".....Di PLN Batam itu dalam pengambilan keputusan, terutama direksi, itu mengacu ke board manual... Sekretaris perusahaan itu akan mengacu ke board manual tersebut juga dan akan mengingatkan direksi apabila ada hal-hal yang memang sebenarnya itu butuh mungkin kajian, setelah itu mungkin butuh GRC-nya, atau butuh opini-opini dari pihak-pihak yang berkepentingan lainnya sebelum direksi mengambil keputusan... Jadi dia ada tahap-tahapannya. Ketika direksi apalagi itu keputusan strategis, itu kan akan diambil nanti itu melalui risalah rapat... Tapi sebelum ke rapat sirkuler itu, udah ada tuh kajiannya baik kajian dokumen, kajian risiko... Nah itu udah dibahas dulu tuh sama tim GRC "(Kutipan wawancara dengan asisten manager kesekretariatan dan document control).

Dalam proses tersebut, sekretaris perusahaan berfungsi sebagai koordinator yang memastikan seluruh tahapan telah dilaksanakan sebelum keputusan memperoleh persetujuan. Selain itu, sekretaris perusahaan juga melakukan penelaahan terhadap kesesuaian keputusan dengan board manual yang menjadi pedoman utama pelaksanaan Kewenangan direksi dan dewan komisaris. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target bisnis, tetapi juga memperhatikan aspek kepatuhan dan mitigasi risiko. Dengan demikian, tata kelola perusahaan dapat berjalan secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Adaptasi terhadap ASEAN corporate governance (ACGS)

Perubahan sistem penilaian dari SK-16 menuju ACGS menjadi salah satu dinamika penting yang ditemukan dalam penelitian ini. ACGS pada dasarnya dikembangkan untuk perusahaan terbuka yang tercatat Di pasar modal ASEAN. Oleh karena itu, penerapannya pada perusahaan non Tbk seperti PT PLN Batam memerlukan penyesuaian tertentu.

".....Model lama itu kan SK-16, itu khusus untuk BUMN. Tetapi karena dicabut, jadi kita kan menggunakan model baru ACGS. Nah, ACGS ini sebenarnya itu lebih kepada perusahaan terbuka... Sementara kan PT PLN Batam ini kan non-Tbk ya... Jadi ada hal-hal yang tidak inline dengan PT PLN

Batam untuk pemenuhannya. Nah kita hanya memasukkan hal-hal yang inline dengan PT PLN Batam... Paling ya ada poin-poin yang jawabannya jadinya NA (Not Applicable) gitu, tidak inline gitu. Tapi kalau secara kesulitan mendasar itu sih enggak ada... Kalau misalnya metodenya berubah, berubah itu pertanyaannya pasti berubah tapi evidence-nya itu tetap ada." "(Kutipan wawancara dengan asisten manager kesekretariatan dan document control).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi sejumlah indikator yang tidak sepenuhnya relevan dengan karakteristik organisasi. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menghambat proses penilaian Karena perusahaan mampu melakukan pemetaan indikator dan menyediakan evidence yang diperlukan sesuai dengan substansi tata kelola yang diterapkan.

Peningkatan skor ACGS pada tahun 2025 menunjukkan bahwa perusahaan berhasil beradaptasi dengan instrumen penilaian baru. Keberhasilan tersebut mencerminkan adanya komitmen organisasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola meskipun standar yang digunakan semakin kompleks.

Tindak lanjut area of improvement sebagai wujud perbaikan berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap assessment menghasilkan area of improvement yang harus ditindaklanjuti oleh unit terkait sekretaris perusahaan bertanggung jawab mengkoordinasikan Proses penyampaian rekomendasi memantau implementasi perbaikan, serta melaporkan perkembangan tindak lanjut kepada manajemen.

"....Setelah itu, sekretaris perusahaan akan menota-dinaskan AOI itu ke bidang masing-masing untuk ditindaklanjuti. Biasanya secara berkala kita akan menanyakan tindak lanjut terhadap AOI itu sehingga nanti di penilaian ke depan kita AOI itu tidak muncul lagi gitu. Nah, AOI itu juga kita monitor lewat laporan manajemen. Jadi di LM itu, laporan manajemen triwulanan PT PLN Batam itu, ada bab khusus untuk AOI. Jadi di sana nanti akan terlihat apakah sudah ditindaklanjuti, baik dari sisi PT PLN Batam, dewan komisaris, dewan direksi, sampai dengan pemegang saham." Kutipan wawancara dengan asisten manager kesekretariatan dan document control).

Pemantauan dilakukan secara berkala melalui laporan manajemen pergaulan sehingga setiap rekomendasi dapat dikontrol progres penyelesaiannya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hasil penilaian tidak terhenti pada tahap evaluasi, tetapi menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan tata kelola secara berkelanjutan.

Jika ditinjau melalui pendekatan PDCA plendocek proses penilaian diterapkan PT PLN Batam menunjukkan adanya siklus perbaikan yang berjalan secara konsisten. Temuan kelemahan dijadikan dasar penyusunan rencana perbaikan, dilaksanakan oleh unit terkait dievaluasi secara berkala, dan kemudian dijadikan acuan dalam peningkatan standar tata kelola pada periode berikutnya.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sekretaris perusahaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung proses penilaian GCG di PT PLN Batam titik peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi administratif tetapi juga mencakup fungsi koordinasi komunikasi, pengendalian, dan fasilitas perbaikan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran sekretaris perusahaan dalam mendukung proses penilaian Good Corporate Governance (GCG) di PT PLN Batam, dapat disimpulkan bahwa sekretaris perusahaan memiliki peran strategis dalam menjaga efektivitas pelaksanaan tata kelola perusahaan. Sekretaris perusahaan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam mengoordinasikan proses penilaian GCG, memastikan ketersediaan informasi dan dokumen pendukung, serta menjembatani komunikasi antar unit kerja. Peran tersebut mendukung terlaksananya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam proses tata kelola perusahaan sehingga penilaian GCG dapat berjalan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan proses penilaian GCG di PT PLN Batam dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik, keterbukaan informasi, serta komitmen perusahaan dalam melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Sekretaris perusahaan menjadi salah satu aktor penting yang memastikan setiap tahapan penilaian dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, mulai dari pengumpulan data hingga tindak lanjut rekomendasi hasil asesmen. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada peran sekretaris perusahaan dalam satu perusahaan, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh perusahaan dengan karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, PT PLN Batam diharapkan dapat terus meningkatkan optimalisasi fungsi sekretaris perusahaan sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi, terutama dalam aspek koordinasi lintas unit, pengelolaan informasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil penilaian GCG. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan melibatkan perspektif pihak lain seperti direksi, dewan komisaris, unit kepatuhan, maupun

auditor eksternal agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan

REFERENSI

- Afrizal. 2016. "Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1 (1): 1–23. <https://Ojs.Umrah.Ac.Id/Index.Php/Kemudi/Article/View/728/489>.
- Dwiridotjahjono, Jojok. 2009. "Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis Unpar* 5 (2): 101–12.
- Elisa, Novi, Jeklina Rabi, Rendy Pratama Dayu Agustian, Wilhelmus Salfi Aba, And Agnes Cirawu. 2024. "Analisis Good Corporate Governance Pada Pt. Gudang Garam, Tbk." *Wallaby: Jurnal Manajemen, Bisnis & Akuntansi* 1 (1): 44–55. <https://doi.org/10.65675/Wlb.V1i1.8>.
- Gibson. 2002. *Organisasi Perilaku-Strukturproses*, Terjemahan, Edisi V. Jakarta. Penerbit Erlangga.

- Khairun, Aurel. 2023. "Peran Sekretaris Di Perusahaan." *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya* 2 (3): 62–66. <https://doi.org/10.54371/Jms.V2i3.298>.
- Muhammad Iqbal, Erlina Erlina, Fadhila Audi Ubay, And Muhammad Alwan Atha. 2024. "Konsep Dan Teori Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Syariah Indonesia." *Santri: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1 (6): 377–85. <https://doi.org/10.61132/Santri.V1i6.280>.
- Oktavia Lepa, Sofie Pengemanan, And Ismail Rachman. 2019. "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pembangunan Pertanian (Studi Di Kecamatan Passi Timur)." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3:1–10.
- Pasaribu, Ali Safran, Farisa Nadhila Siregar, And Fikry Haikal. 2026. "Teori-Teori Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Perspektif Perbankan Syariah Di Indonesia." *Kampus Akademik Publisng: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 4 (1): 580–87. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/8252>.
- Riskiaman Gea, Ayler Beniah Ndraha, Yupiter Mendrofa, Sukaaro Waruwu. 2023. "Peran Kepala Desa Dalam Mengelola Kerjasama Kelembagaan Di Pemerintahan Desa Tetelesi I Kota Gunungsitoli." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (Jmbi Unsrat)* 6 (1): 2307–20.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia.
- Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Solomon, J.F., Solomon, A., And Park, C. 2002. The Role Of Institutional In-Vestors In Corporate Governance Reform In South Korea: Some Empirical Evidence. *Corporate Governance: An International Review*, 10 (3), July: 211 - 224.
- Sudharmono, Johny, And Hetty Karunia Tunjungsari. 2021. "Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt Bumn Abc, Indonesia." *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 5 (1): 225. <https://doi.org/10.24912/Jmieb.V5i1.11549>.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaron, Florence Daicy J. Lengkong, And Joorim Ruru. 2023. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik (Jap)* 0777 (0899): 2222.
- Yusuf, A. M. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*